

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aimirudin & B, A.Zaini. 2006. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung dan Prospek Sengketa Singkat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2005. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, A. 2002. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- Amiruddin & Bisri., A.Z. 2006. Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Problem dan Prospek Sengketa Singkat Pemilihan Kepala Daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asshidiqi, J. 2010. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika
- Asshidiqi, J. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. 2007 Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Asshidiqi, J. 2011. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Press Bachtar. 2015. Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Bakhri, S. 2009. Perkembangan Stelse Pidana di Indonesia. Yogyakarta: Total Media.
- Budiardjo. M. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo M. 2015. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Cst
- Kansil, Kamus Istilah Hukum, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 270.
- Effendi, T. 2019. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Iundroharto. 1991. Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.

- Johannes, A.W. 2020. Pilkada Mencari Pemimpin Daerah. Bandung : CV Cendekia Press.
- Latif, A, dkk. 2009. Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Yogyakarta: Total Media
- Muladi & B, Nawawi Arief. 1992. Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Qamar Nurul. 2013. Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rhiti, H. 2015. Filsafat Hukum Cetakan Kelima. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Rhiti, H. 2015. Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- Santoso, M.A. 2014. Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum Jakarta: Kencana.
- Santoso, M.A. Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua. Jakarta: Kencana
- Siahaan, M. 2011. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sidharta, B.A. 2010. Ilmu Hukum Indonesia. Bandung: FH Unika Parahyangan.
- Soekanto. S & S, Mamudji. 2011. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeroso. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Surbakti, R. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Grasindo.
- Susanto, A.S., 1983. Pengantar Sosiologi. Jakarta: Bina Aksara.
- Syahrani, R. 1999. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Volmar, H.F.A. 1996. Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I. Jakarta. RajaGrafindo Persada.
- Yamani, A.S. 2012. Remah-Remah Pemerintahan. Jakarta: Wadi Press.

Zainal, A. 2012. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Jakarta. Rajawali Press.

B. Jurnal

Mohammad Aldy Firdaus. (2016). Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Mantan Narapidana yang Menjadi Calon Kepala Daerah. *Jurnal Novum*. Vol.1 No.2. hlm. 9.

Suheri, A. 2018. Wujud Keadilandalam Masyarakat di Tinjau dari Persepektif Hukum Nasional. *Jurnal Morality*. Vol.4 No.1. hlm. 60.

Wantu, F.M. 2012. Mewujudkan Kepastian Hukum Gorontalo. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 12 No.3. hlm 12

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 7 Angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Putusan MK No. 56/PUU/XVII/2019

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 23 Tentang HAM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia(PKPU) Nomor 9 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemillihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Walikota

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011

UUD 1945

Undang-Undang Komisi Pemlihan Umum Daerah Dompu (KPUD Dompu) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 55 /HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/VI/TAHUN 2020. Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020, di ubah salah satu nya persyaratan calon terpidana untuk dapat menjadi kepala daerah

D. Website

BBC News Indonesia, Mengapa calon di Pilkada yang jadi tersangka korupsi didukung pemilih?, 29 Juni 2018, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44644077> , disadur pada 20 September

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia”Hak Politik Warga Negara (Sebuah Perbandingan Konstitusi)”, dalam <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-danpuu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuahperbandingankonstitusi.html> , diakses pada 15 Desember 2019.

